



MEMAHAMI
ALOKASI BELANJA PUBLIK
PADA ERA DESENTRALISASI



Rachmat Hidayat

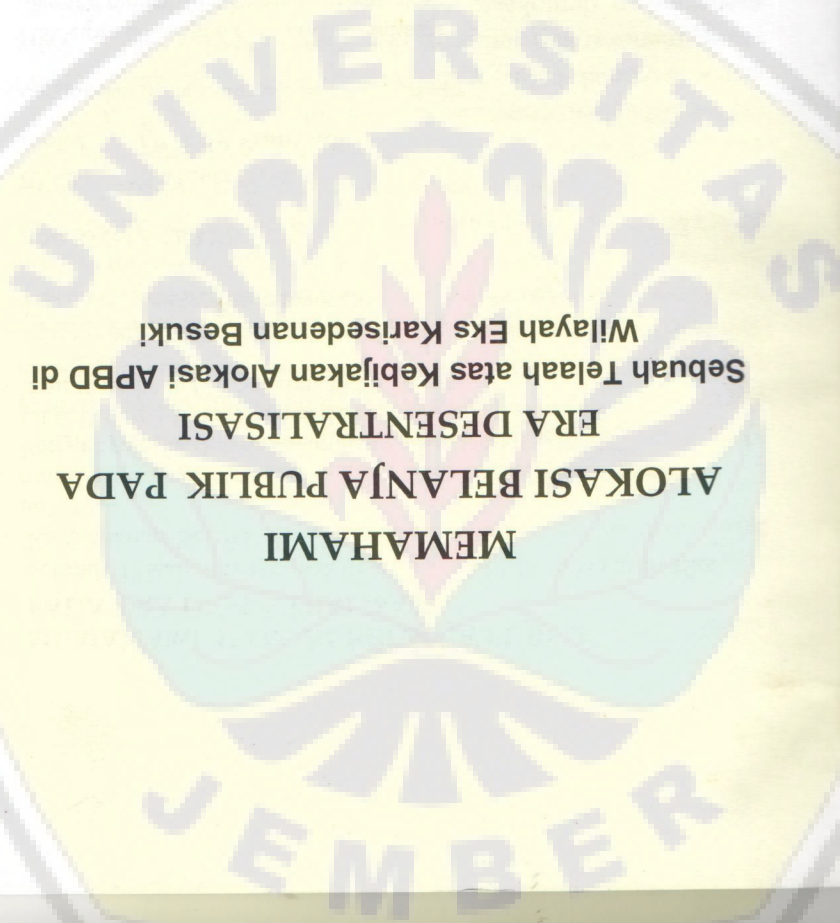
SISTEM
RADJA

Pustaka Radja



RACHMAT HIDAYAT

MEMAHAMI
ALOKASI BELANJA PUBLIK PADA
ERA DESENTRALISASI
Sebuah Telaah atas Kebijakan Alokasi APBD di
Wilayah Eks Karisidenan Besuki



PENGANTAR

Bismillahitromantirrohieni

Perjalanan Bangsa ini selalu diwarnai atas perjalanan akan pencarian sistem pemerintahan yang sempurna. Miller dalam *Post-modern Public Administration* selalu berujar bahwa tugas administrasi publik adalah untuk mencari suatu gagasan dan melaksanakan tugas tata pemerintahan administrasi yang sempurna atau dalam kata lain adalah *Governing Utopia*. Begitupun dalam konteks Indonesia, *Founding father* kita selalu berusaha untuk melakukan re-invensi terhadap sistem tata laksana pemerintahan yang sempurna dan *majestic* sesuai dengan kebutuhan bangsa. Penelitian Bhenyamin Hoessein (1995) kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di NKRI selalu berbolak-balik arah: dari desentralisasi administratif yang menekankan efisiensi ke desentralisasi politik yang menekankan demokrasi. Hal tersebut berhubungan dengan situasi sosial dan politik yang berkembang serta pandangan dan konsepsi politik penguasa dan kekuatan politik pendukungnya, yang menentukan kebijakan pada saat yang bersangkutan sebagai pelaku utama.

Dengan titik berat otonomi daerah pada kabupaten/kota, diharapkan bisa membawa dampak signifikan bagi tercapainya tujuan-tujuan negara yang selama ini telah direduksi secara sistematis dan korporatis oleh pemegang kekuasaan. Lebih dari itu, yang tak kalah pentingnya adalah masalah kenejangan (visi, misi, kebijakan dan implementasi serta interaks) antara negara (pemerintah) dan masyarakat dalam berbagai sisi kehidupan yang diakibatkan oleh sistem

MEMAHAMI ALOKASI BELANJA PUBLIK
PADA ERA DESENTRALISASI

Sebuah Telaah atas Kebijakan Alokasi APBD di Wilayah Eks
Karisedenan Besuki
@2012

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
Oleh Penerbit Buku Pustaka Radja, Pebruari 2012
(Lini Penerbitan CV Salsabila Putra Pratama)

Kantor: Perum Surya Milenia C.7 No.6 Jember.
Tlp. 0331-3694582, 081249995403

ANGGOTA IKAPI

Penulis : Rachmat Hidayat

Editor : Dr. Edy Wahyudi

Layout dan desain sampul: Salsabila Creative

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN : 978-602-7567-07-8
vi + 100; 14.5 x 21 cm.

etatis-sentralistik pada pemerintahan masa lalu, bisa membaaur dan bahkan mampu menuju kearah konsolidasi (visi, misi, kebijakan dan implementasi serta interaksi) pada tingkat nasional maupun lokal.

Konsolidasi yang dimaksud adalah kesamaan visi, misi, penyusunan kebijakan, dukungan implementasi dan interaksi yang intensif dan konstruktif antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pemerintahan dan pembangunan di daerah. Namun, masing-masing pihak tetap pada peranan, fungsi dan tugas masing-masing, sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan bersama. Peluang konsolidasi ini penting dilakukan seiring dengan pergeseran rekrutmen kepemimpinan daerah, yang semula didominasi kepala daerah yang berasal dari birokrasi (*bureaucratic government*) menjadi yang berasal dari partai politik (*party government*) yang dipilih langsung oleh masyarakat.

Memahami Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 isu desentralisasi dan otonomi daerah tak hanya masuk pada ranah teoritis tapi juga praksis.

Buku ini mencoba memberikan pandangan yang berbeda bagaimana seharusnya alokasi belanja publik pada era desentralisasi, dimana pemerintahan daerah sering dihindangi ketakutan melakukan inovasi kebijakan dan alokasi anggaran berbasis kebutuhan daerah. Ranah riset yang sudah dilakukan sebelumnya, belum mampu menjawab bagaimana perencanaan alokasi anggaran disusun berbasis kebutuhan saat ini ataupun dimasa datang. Buku ini setidaknya berupaya memberikan pemahaman bagaimana kemandirian fiskal dan alokasi

anggaran dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, baik merangsang investasi ataupun orientasi pemberdayaan ekonomi lokal.

Jember, Januari 2012
Editor

Dr. Edy Wahyudi



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	~	iii
Daftar Isi	~	v
BAB I Desentralisasi dan Belanja Publik	~	1
Pengantar	~	1
Fokus Pembahasan	~	6
BAB II Logika Politik Anggaran	~	15
Kedaulatan Rakyat dan Politik Anggaran	~	15
BAB III Peran Belanja Publik dalam Era Desentralisasi	~	19
Otonomi Daerah dan Pembangunan daerah	~	19
Peran Pemerintah dalam Perekonomian Modern	~	22
Otonomi Daerah dan Kemiskinan	~	28
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	~	34
BAB IV Telaah atas Kebijakan Alokasi APBD di Wilayah Eks Karisedanan Besuki	~	39
Kabupaten Jember	~	40
Kabupaten Situbondo	~	43
Kabupaten Banyuwangi	~	46
Kabupaten Bondowoso	~	48

1. Struktur Keuangan Pemerintahan Daerah ~ 50
2. Analisis Data dan Pembahasan ~ 55

BAB V PENUTUP ~ 89
DAFTAR PUSTAKA ~ 95
BIOGRAFI PENULIS ~ 99

BAB I

Desentralisasi dan Belanja Publik

Pengantar

Di tengah tumbuhnya harapan adanya perubahan yang lebih baik, melalui otonomi daerah, presiden baru pilihan langsung rakyat, komitmen pemberantasan korupsi dan optimisme capaian stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, muncul kasus khas negara miskin : polio, gizi buruk dan busung lapar. Data Depkes 2005 mencatat bahwa dari jumlah balita 20,87 juta, 4,5 juta balita kekurangan gizi, 3,5 juta dari keluarga miskin (Kompas, 17/6/2005). Di beberapa daerah tidak sedikit balita yang meninggal karena gizi buruk. Bahkan Supriyono (pemulung di Jakarta), harus menggondong mayat putranya (meninggal karena mutaber) yang dilbungkus kain sarung kumal naik kereta rel listrik

Rachmat Hidayat

karena tak mampu membeli kafan dan menyewa mobil ambulance.

Beberapa faktor yang menyebabkan menyeruaknya kasus tersebut, paling tidak disebabkan oleh tiga faktor yaitu 1) peranan pers; 2) masalah kemiskinan; 3) efek otonomi daerah. Peranan pers yang bebas seperti saat ini memungkinkan penyampaian berita secara cepat, menyebar luas, informative dan penuh dengan makna (pengaruh penggunaan audio visual sehingga efektif menyentuh nurani). Data BPS sesungguhnya sejak lama telah menyajikan adanya data kasus gizi buruk, namun selama ini belum terlalu di blow-up media.

Gizi buruk dan busung lapar merupakan akibat dari kemiskinan. Dampak krisis ekonomi 1997 menyebabkan jumlah penduduk miskin naik 39,1 % atau kira-kira menjadi 79,4 juta orang (1998) dari 22,6 juta orang atau 11,3 % dari jumlah penduduk pada tahun 1996, (BPS, 1998). Melalui berbagai paket program khusus pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi, angka kemiskinan telah turun menjadi 16,6% pada Februari 2004 (Adiningsih, 2005). Pada tahun 2005, beberapa ekonom memperkirakan bahwa angka kemiskinan meningkat karena efek domino kenaikan BBM. Bahkan presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri mengakui bahwa hingga kini jumlah penduduk miskin mencapai 35 juta penduduk. (Metro TV, 12 Juli 2005).

Faktor lain yang memunculkan kasus gizi buruk dan kemiskinan adalah efek negatif otonomi daerah (Otda). Secara konstitusional dan normative tujuan utama otda adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, karena lebih dekat dan mengetahui kebutuhan masyarakatnya dibanding pemerintah pusat. Fakta yang terjadi setelah 5 tahun implementasi otda justru menunjukkan kecenderungan pertentangan dengan cita-cita otda.

Secara konstitusional dan normative tujuan utama otda adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, karena lebih dekat dan mengetahui kebutuhan masyarakatnya dibanding pemerintah pusat. Fakta yang terjadi setelah 5 tahun implementasi otda justru menunjukkan kecenderungan pertentangan dengan cita-cita otda.

Efek negatif otda menurut Surbakti (2001), antara lain : 1) adanya inkoordinasi antara kabupaten / kota dengan propinsi; 2) arogansi kekuasaan DPRD untuk kepentingan pribadi anggota dewan; 3) menguatnya isu kedaerahaan secara sempit, pejabat haruslah orang setempat; 4) pemisahaan teritorial secara tegas terutama akses ekonomi hingga menimbulkan konflik misalnya konflik areal tangkap ikan; 5) eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya alam untuk mendorong PAD.

Selanjutnya menurut Haris (2005) eksese otda yang lain adalah : 1) daerah berlomba menggemukkan institusi daerah untuk meraih dana perimbangan dari

Rachmat Hidayat

pusat yang lebih besar; 2) memunculkan raja-raja kecil di daerah; 3) semakin suburnya KKN di daerah karena lemahnya pengawasan dan kolusi eksekutif - legeslatif - yudikatif. Bahkan dengan Pilkada, agenda pertama bupati / walikota terpilih adalah prioritas balik modal dan memberi konsensi ekonomi kepada political entrepreneur (investor politik) sebelum memikirkan pembangunan daerah atau menyajahterakan rakyatnya.

Fenomena yang muncul kemudian adalah bupati / walikota lebih berorientasi pada pembangunan fisik atau belanja barang daripada non-fisik, misalnya program pengentasan kemiskinan melalui dana bergulir. Melalui pembangunan fisik dan pembelian barang, kemungkinan mark-up dan KKN atas tender mudah dilakukan. Indikasi hal ini adalah semakin banyaknya pejabat eksekutif dan dewan yang ditahan karena KKN akhir-akhir ini.

Perselingkuhan eksekutif dan DPRD dapat dilihat dari indikasi semakin membesarnya pengeluaran APBD untuk pengeluaran rutin. Eksekutif dan anggota DPRD berlomba memperbesar pengeluaran untuk peningkatan kesejahteraan baik berupa fasilitas (rumah dinas, kendaraan, asuransi, dll), kenaikan gaji, tunjangan, pesangon dan lainnya. Acara studi banding anggota dewan bukan hanya ke daerah lain tetapi juga ke luar negeri. Ditengah isu busung lapar dan kemiskinan, DPR mengusulkan kenaikan gaji dan rencana anggaran plesiran anggota DPR ke luar negeri hingga mencapai 32,4 milyar rupiah. Bahkan anggota DPRD Surabaya

tidak malu-malu lagi meminta mobil dinas, meski bertentangan dengan peraturan yang ada (Kompas, 13/7/2005).

Pengangguran, kemiskinan dan gizi buruk merupakan mata rantai yang saling berkait. Data BPS Februari 2005 menunjukkan pertambahan jumlah pengangguran sebesar 600.000 jiwa. Peningkatan ini menyebabkan pengangguran terbuka naik dari 9,9% (Agustus 2004) menjadi 10,3% (Februari 2005). Selanjutnya jumlah orang yang bekerja tidak penuh juga menunjukkan peningkatan dari 29,8 % (Agustus 2004) menjadi 31,2% (Februari 2005). Gambaran semakin suram, mengingat investasi belum meningkat tajam dan kemampuan pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja baru semakin terbatas akibat terhimpitnya kebijakan fiskal dan moneter serta beban pemerintah sendiri kian berat. Basri, (2005).

Laode Ida (2000) mengemukakan bahwa sedikitnya ada tiga esensi dari Otonomi Daerah. Pertama, pengelolaan kekuasaan berpusat pada tingkat local yang berbasis pada rakyat. Kedua, dimensi ekonomi. Artinya dengan Otonomi daerah maka daerah-daerah diharapkan mampu menggali dan mengembangkan sumber-sumber ekonomi yang ada di wilayahnya. Adanya kemampuan daerah untuk membiayai dirinya sendiri paling tidak memperkecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Ketiga, Dimensi Budaya, artinya dengan Otonomi daerah, maka masyarakat local harus diberi kebebasan untuk bereksprsi dalam

mengembangkan kebudayaan local. disinilah pentingnya memikirkan kembali strategi pembangunan secara mendasar, yakni pada upaya membangun ekonomi berbasis local

Otonomi daerah pada hakekatnya merupakan upaya untuk menciptakan demokratisasi ekonomi, khususnya persamaan, menggali dan memanfaatkan potensi daerah bagi daerah itu sendiri, namun secara ekonomis otonomi daerah dapat dipandang sebagai upaya untuk melakukan liberalisasi ekonomi. Liberalisasi yang dimaksud dapat terlelisir bila pemerintahan daerah mampu mengembangkan dan mendayagunakan potensinya secara optimal, artinya pemerintah daerah dengan segala upayanya harus terus menggali dan mengembangkan potensi daerahnya dengan sungguh-sungguh, sehingga untuk mendukung realisasi tersebut diperlukan kebijakan pemerintah dalam memobilisir sumber-sumber penerimaan daerah untuk pembangunan daerah. Berdasarkan logika ini maka seharusnya otoda berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Fokus Pembahasan

Otonomi daerah akan efektif jika diikuti dengan otonomi keuangan daerah. Otonomi keuangan daerah akan dapat dicapai jika daerah mampu membiayai pengeluarannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berangkat dari pemikiran ini, maka dalam era otoda banyak daerah berlomba meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi

number PAD. Berbagai retribusi dan pungutan diintensifkan untuk mendongkrak PAD. Semangat mendongkrak PAD bahkan kebablasan seperti menaikkan tarif pelayanan rumah sakit milik daerah yang merupakan sarana pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, meski pendapatan yang diperoleh tidak seluruhnya untuk pengembangan rumah sakit (Kompas 17 Juni 2005).

Hasil penelitian terhadap APBD terdahulu yang dilakukan oleh Penulis di empat Kabupaten eks Karisidenan Besuki juga menunjukkan kecilnya kontribusi PAD dalam pembangunan daerah.

Tabel 1 Rerata Rasio Penerimaan 4 Kabupaten, 1997 – 2004 (%)

Uraian	Kabupaten			
	Jember	Banyuwang	Situbond	Bondowos
PAD/Penerimaan	7.55	7.33	5.39	5.13
Retribusi Daerah / PAD	51.01	52.27	36.57	52.55
Dana Perimbangan / Penerimaan	71.59	82.01	79.07	67.26
Bagi Hasil Pajak / Penerimaan	5.86	5.97	6.77	5.53

Sumber : Alokasi APBD untuk pelayanan kebutuhan dasar, Hidayat (DIPA-Lemlit Unej 2005)

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pada dasarnya pelaksanaan otonomi daerah belum menunjukkan perubahan yang signifikan pada struktur penerimaan (pendapatan) daerah dan masih menunjukkan belum adanya kemandirian keuangan pemerintah daerah. Hal ini tercermin dari komposisi penerimaan (pendapatan) masih didominasi dari Dana Perimbangan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bantuan Pemerintah Pusat (DAU - DAK), sedangkan sumber PAD dan Penerimaan lain yang sah memberi kontribusi yang rendah (dibawah 8 %).

Relatif rendahnya dana Bagi Hasil Pajak dibanding Total Penerimaan (pendapatan) atau dengan Dana Perimbangan mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat, melalui bantuan pemerintah pusat dalam bentuk Subsidi Daerah Otonom dan Inpres atau DAU dan DAK

Indikasi lain dari kekurangan mandirian pemerintah daerah adalah relatif rendahnya PAD dibanding total penerimaan. Pada hakekatnya PAD merupakan sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah secara leluasa bagi pelayanan masyarakat. Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah relatif tingginya kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa relatif besarnya pungutan yang dikenakan pemerintah daerah pada masyarakatnya. Seharusnya sumber kontribusi terbesar adalah kontribusi dari Laba BUMD. Pelaksanaan otonomi

daerah telah mendorong pemerintah daerah berlomba meningkatkan PAD melalui peningkatan retribusi daerah yang justru meningkatnya beban masyarakat.

APBD hakekatnya merupakan kontrak politik antara rakyat (yang diwakilkan kepada DPRD) dan eksekutif, Melalui bekal sumber-sumber ekonomi dalam APBD, eksekutif diharapkan dapat menggerakkan mesin birokrasi untuk berperan secara strategis dalam meningkatkan pertumbuhan daerah. Dengan kata lain Pemerintah daerah diasumsikan sebagai pembuat / perumus dan pelaksana kebijakan yang memberi corak atau bentuk interaksi antara peran pemerintah dan awasta

Hal yang mengkhawatirkan adalah kontrak politik tidak dibuat menurut mekanisme pasar yang sempurna. Rakyat tidak lain adalah Principal (yang diwakilkan pada DPRD) dan eksekutif adalah Agent. Mekanisme pengaturan hubungan tidaklah berjalan seimbang. Rakyat tidak terorganisir secara sempurna, tidak memiliki informasi yang sempurna dan memiliki keterbatasan rasionalitas sedang eksekutif memiliki informasi yang sempurna tentang sumber-sumber ekonomi, alokasi dan administratifnya. Perwakilan pada anggota DPRD belum cukup efektif mewakili kepentingan rakyat karena anggota DPRD juga berlaku sebagai aktor yang memiliki motif ekonomi sendiri (untuk balik modal dari pemilu dan kas partainya). Implementasi motif tersebut semakin subur dalam era otonoda, mengingat eksekutif bisa dijatuhkan DPRD jika

Rachmat Hidayat

laporan pertanggungjawabannya ditolak dewan. Dalam paradigma ini maka adalah lumrah jika APBD merupakan ajang untuk berbagi sumber-sumber ekonomi bagi eksekutif dan legeslatif (yang sama-sama butuh balik modal setelah pemilu).

Berdasarkan fakta di atas maka yang menarik untuk dikaji lebih jauh dalam buku ini adalah :
Bagaimanakah pola pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di empat kabupaten eks Karisidenan Besuki era otoda ? apakah lebih berorientasi pada kepentingan rakyat miskin (kebutuhan dasar) ataupun kepentingan birokrat ?
Secara spesifik permasalahan yang dibahas : 1)
bagaimanakah struktur keuangan APBD (pendapatan dan belanja daerah) era otoda di 4 kabupaten eks Karisidenan Besuki ? 2) bagaimana alokasi APBD untuk kebutuhan dasar masyarakat pada era otoda, apakah semakin membaik ataupun justru sebaliknya ?

Disamping pertanyaan diatas, buku ini akan mengungkap beberapa faktor signifikan dalam desentralisasi fiskal yaitu :

Pertama : bagaimanakah struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di era otoda ?
Pertanyaan ini terkait dengan apakah desentralisasi dalam otoda telah ditunjang oleh kemandirian fiskal masing-masing pemkab ?
Kedua : apakah dana perimbangan dari pusat telah dialokasikan untuk

Rachmat Hidayat

Dan ketiga belas, hasil uji statistik berdasarkan data administratif (berdasarkan dokumen APBD) menunjukkan pelaksanaan otonomi daerah mendorong pemerintah daerah lebih memberi perhatian yang besar pada pelayanan kebutuhan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Nursalim, 1990, *Hubungan Fiskal Antar Pemerintah di Indonesia*, Jakarta : Analisa, Tahun XIX, No 3, Juni 1990
- Bratakusumah, Deddy Supriadi dan Dadang Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cernea, M.M., 1985, *Putting People First : Sociological Variables in Rural Development*, Oxford University
- Davey, Kenneth, 1988, *Pembiayaan Pemerintah daerah : Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Jakarta : UI-Press.
- Dryzek, John, 1996, *Political Inclusion and the Dynamics of Democratization*, *American Political Science Review*, Vol. 90, No, 1 September.
- Hidayat, Rachmat, Dwi Sungkowo, 2005, *Penelitian Alokasi APBD untuk pelayanan Kebutuhan dasar di era desentralisasi pada empat kabupaten eks Karesidenan Besuki*, Lembaga Penelitian Universitas Jember
- Korten, David C, 1985, *Social Development : Putting People First, Bureacracy and the Poor : Closing the Gap*, Asian Institute of Management, Manil. Printing.
- _____, dan Sjahrir (ed), 1998, *Pengembangan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta : Yayasan Obor.

Rachmat Hidayat

- Mawhood, Philip (ed) 1983, *Local Government in The Third World : the Experience of Tropical Africa*, New York : John Wiley & Sons.
- Mangkusobroto, Guritno, 2000, *Ekonomi Publik*, Edisi 3, Yogyakarta : BPFE.
- Radiano, Elia, 1997, *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II : Suatu Studi di Maluku*, Jakarta : Prisma, No 3 Tahun XXVI, Maret 1997.
- Rondinelli, D.A, 1981, *Government Decentralization in Comparative Perspective : Theory and Practice in Developing Countries*. International Review of Administrative Vol. XLVII No.2
- Sugiyono, 2000, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta.
- Suryawikarta, B, 1995, *Implikasi Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Dati II dan Restrukturisasi Birokrasi untuk Meningkatkan Kinerja Pembangunan dan Mutu Pelayanan*, Makalah Seminar FISIP Unsoed dan Pemda Kabupaten Banyumas.
- Stewart, Jenny, 1997, *Business and Government as Policy*, in Colebatch HK et.al., *Business-Government Relations : Concepts and Issues*, Melbourne : Nelson ITP.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996, *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*, Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solihin Abdul, Fadillah Putra dan Saiful Arif, 2002, *Masa Depan Otonomi Daerah : Kajian Sosial, Ekonomi dan Politik Untuk Menciptakan Sinergi*

96

dalam *Pembangunan Daerah*, Surabaya : Penerbit SIC.

Weningsih, Sri, *Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Banyumas : Sistem Kelembagaan dan Efektivitas Pelaksanaannya*, Jakarta : Jurnal Studi Indonesia Vol 10 No 1 Maret 2000, PSI – UT.

Terbitan dan Koran

- Anonim, 2003, *Data dan Informasi*, Komite Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta.
- _____, 2003, *Pedoman Umum Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah*, Komite Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta.
- _____, 2005, *Indikator ekonomi memburuk*, Kompas, 2/9/2005
- _____, 2005, *Tinjau Desentralisasi Pelayanan Dasar*, Kompas, 17/6/2005
- _____, 2005, *Pengadaan Mobil Dinas Tidak Berdasar Hukum Kuat*, Kompas, 14/7/2005.
- _____, *DPR Tuding Eksekutif Juga Boros*, Kompas, 14/7/2005.
- Astuti, Esther Sri, Joko Tri Haryanto, *Analisis Dana Alokasi Umum dalam era Otonoda Studi kasus 30 Propinsi*, Manajemen Usahawan, No 12 Desember 2005
- Adingsih, Sri, 2005, *Instabilitas Ekonomi yang Membahayakan*, Bisnis Indonesia, 7/7/2005.
- Asyarie, Musa, 2005, *Korupsi dan Transaksi Kekuasaan*, Kompas, 6/5/2005

97

Rachmat Hidayat

Basri, Faisal, 2005, *Pertumbuhan Naik, Pengangguran Juga Naik*, Bisnis Indonesia, 8/6/2005.

Haris, Syamsudin, 2005, *Dilema Pemuda Prodruk Pilkada*, Kompas. 27/6 2005

Surbakti, Ramlan, 2001, *UU Otonomi Daerah : Revolusi atau Implementasi ? Kompas*, 2/9/2001.

BIOGRAFI PENULIS



Rachmat Hidayat adalah anak pasangan Slamet Wibowo dan Nurhayati yang dilahirkan pada 22 Maret 1981 di Surabaya, Jawa Timur. Pada tahun 1999 ia menyelesaikan sekolah lanjutan atas, SMA Hang Tuah 1 di kota kelahirannya dan pada tahun 2004, ia menyelesaikan kuliahnya di Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Jember.

Perjalanan nasib membawanya kembali ke kota Jember, tempat ia menuntut ilmu. Pada Januari 2005, pria yang gemari Basket dan Musik ini tercatat sebagai staff pengajar di Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Jember sampai sekarang.

Pada Tahun 2007-2008 Rachmat Hidayat Mendapatkan Beasiswa Unggulan Double Degree DIKTI untuk melanjutkan studi pasca sarjana pada Ilmu administrasi Publik pada University of Wyoming dan Ilmu Politik pada Universitas Diponegoro.

Sejak tahun 2009 sampai saat ini ia aktif tercatat sebagai salah satu anggota Pada Pusat Penelitian dan Kebencanaan Universitas Jember. Selain itu kesibukannya sebagai Sekretaris Program Studi Perpajakan FISIP Universitas Jember. Semangatnya untuk memberikan yang terbaik kepada almahmatnya tidak berhenti sampai disini. Pria ini aktif sebagai

Rachmat Hidayat

peneliti di bidang Desentralisasi dan Kebencanaan. Beberapa proyek penelitian dilaksanakan dibawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Asian Development dan juga beberapa Pemerintahan Daerah di Jatim.

Pada saat ini Penulis sedang dalam proses persiapan Studi Doktoral yang direncanakan berjalan pada Juli 2012 di Charles Darwin University Australia dengan *endorsement* beasiswa dari DIKTI.

